

## Partisipasi Masyarakat Pada Program KB Pria Di DPPKBP3A Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Dita Kusdiyanti<sup>1</sup> Eko Handrian<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin  
Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
[ditakusdiyanti10@student.uir.ac.id](mailto:ditakusdiyanti10@student.uir.ac.id) [ekohandrian@soc.uir.ac.id](mailto:ekohandrian@soc.uir.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine community participation in the Male Family Planning Program at the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service in Tapung Hilir District, Kampar Regency. The type of research is qualitative, the data collection technique used is primary data collected using interview techniques and secondary data using observation and documentation techniques. The data analysis technique used is descriptive analysis. Based on the analysis technique, it is concluded that the decision-making indicators implemented have not played a role where the DPPKBP3A service is still lacking in conveying information and education on male family planning to the community because it focuses more on postpartum MKJP family planning for women in the process of counseling to the community only involving women because there has been no special socialization for men. Indicators of program implementation in the process found obstacles in the limited budget for male family planning, difficulty in gathering men on the grounds that they are busy working and also anxiety that MOP family planning can have a negative impact on health. In the utilization indicator of the MOP KB program, it does not interfere with men's health, both physically and in terms of husband and wife relations, from the benefits felt by condom KB acceptors, namely safer use. The program evaluation indicator still found obstacles in the form of minimal knowledge of the community itself regarding the use of male KB, side effects and also its benefits, an incomplete understanding of the role as a husband who is less concerned about KB.*

**Key Words :** *Participation, Male Family Planning Program, Population Control Office, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat pada Program Keluarga Berencana Pria Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan teknik analisis menyimpulkan indikator pengambilan keputusan yang dilaksanakan belum berperan dimana pihak dinas DPPKBP3A masih kurang dalam menyampaikan informasi dan edukasi KB pria kepada masyarakat sebab lebih memfokuskan kepada KB MKJP paska salin untuk wanita dalam proses penyuluhan kepada masyarakat hanya melibatkan para wanita sebab sosialisasi khusus kepada pria belum ada. Indikator pelaksanaan program dalam prosesnya ditemukan kendala terbatasnya anggaran dana untuk KB pria, sulit mengumpulkan pria dengan alasan sibuk bekerja dan juga kecemasan bahwa KB MOP dapat berdampak negatif kepada kesehatan. Pada indikator pemanfaatan pada program KB MOP tidak mengganggu kesehatan pria baik secara fisik kesehatan tubuh dan hubungan suami istri, dari manfaat yang dirasakan akseptor KB kondom yakni lebih aman penggunaannya. Indikator evaluasi program masih ditemukan kendala minimnya pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai kegunaan KB pria, efek samping dan juga manfaatnya, pemahaman yang belum menyeluruh terkait peran sebagai suami yang kurang peduli perihal KB.

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Program Keluarga Berencana Pria, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

## Pendahuluan

Program Keluarga Berencana merupakan produk dari Kebijakan Publik Pemerintah, dimana program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Penelitian ini penting diteliti selain untuk mengetahui mengenai jumlah partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Program Keluarga Berencana (KB) dimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 pasal 21 yang membahas dalam hal meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana. Dimana partisipasi dan kesertaan pria masih rendah disetiap tahunnya dan juga sebagai barang pertimbangan bagi masyarakat diharapkan adanya kesadaran khususnya bagi pria untuk meningkatkan status penggunaan alat kontrasepsi dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keluarga Berencana.

Dalam Renstra BKKBN ditetapkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang meliputi:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2024.
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- d. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 5,53 persen.

Bentuk partisipasi pria dalam Keluarga Berencana (KB) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun partisipasi pria secara langsung dalam Keluarga Berencana yakni sebagai peserta KB dengan menggunakan salah satu cara atau metode pencegahan kehamilan seperti; kondom, MOP (Metode Operasi Pria)/Vasektomi, metode senggama terputus, metode pantang berkala atau sistem kalender.

Bentuk partisipasi pria secara tidak langsung seperti:

- a. Memilih kontrasepsi yang cocok, yang sesuai dengan keinginan dan kondisi istrinya.
- b. Membantu istrinya dalam menggunakan kontrasepsi secara benar, seperti mengingatkan saat minum pil KB dan mengingatkan istri untuk kontrol.
- c. Membantu mencari pertolongan bila terjadi efek samping maupun komplikasi dari pemakaian alat kontrasepsi.
- d. Mengantarkan istri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol/rujukan.
- e. Membantu menghitung waktu subur, apabila menggunakan metode pantang berkala.
- f. Menggantikan pemakaian kontrasepsi bila keadaan kesehatan istri tidak memungkinkan.
- g. Mencari alternatif lain bila kontrasepsi yang digunakan tidak terbukti memuaskan.

Dalam rangka menerapkan program Keluarga Berencana (KB) di tingkat kecamatan dan desa yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) wilayah Kecamatan Tapung Hilir yang berada dalam wilayah Kabupaten Kampar turut berpartisipasi untuk mensukseskan pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana (KB) melalui peningkatan partisipasi KB Pria sesuai dengan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penegendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar tahun 2021-2025 dimana terdapat masalah rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

Penerapan Program Keluarga Berencana (KB), dilihat dari tingkat kesuksesan pencapaian perolehan akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Tapung Hilir selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada rangka mengukur tingkat partisipasi KB pria, penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, melalui jenis alat KB ialah Medis Operasi Pria (MOP) serta Kondom pada pencapaian akseptor KB aktif (PA) pada Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2023 Kecamatan Tapung Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2: Data Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2023.

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta Kb Aktif Menurut Alat Kontrasepsi						Jumlah P.KB	Persentase	
			IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	Pil			Kdm
1	2022	11.769	720	63	258	2.371	3.264	2.741	357	9.774	83%
2	2023	12.207	629	45	260	2.107	3.272	2.752	403	9.468	78%
3	2024	12.184	582	46	260	1.911	3.183	2.671	376	9.029	74%

Sumber: Hasil laporan dan pencatatan PLKB Kecamatan Tapung Hilir, 2025

Berdasarkan Tabel I.3 di atas dapat dilihat bahwa alat kontrasepsi yang pemakaiannya digunakan oleh pria pada tabel diatas meliputi Medis Operasi Pria (MOP) dan Kondom, Berdasarkan data Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tahun 2023 bahwa secara keseluruhan peserta KB aktif di Kecamatan Tapung Hilir bekisar 9.468 akseptor atau berkisar 78 persen dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS). Sedangkan partisipasi peserta aktif pria dari total 9.468 peserta KB aktif, hanya berkisar 3,67 persen atau dapat disimpulkan partisipasi pria dalam program KB di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar masih rendah bila dibandingkan dengan partisipasi perempuan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi sementara pada petugas koordinasi dan juga penyuluh KB Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar serta dilihat dari data yang peneliti dapatkan sebelumnya, maka peneliti mendapatkan fenomena sebagai berikut:

1. Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa cakupan partisipasi dan kesertaan pria (bapak) dalam program keluarga berencana (KB) di Kecamatan Tapung Hilir lebih rendah bila dibandingkan dengan partisipasi perempuan.
2. Sebagian masyarakat pria (bapak) beranggapan bahwa program keluarga berencana (KB) hanya diperuntukan untuk perempuan atau Ibu dan menjadi urusan perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pria.

Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis dan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Meningkatkan Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Pria Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### Tinjauan Pustaka

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevan terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Pria di Dinas DPPKBP3A Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang diteliti:

Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat

melalui pemerintahan, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, ilmu administrasi Negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya (Dimock dan Dimock dalam Muhammad (2019:29).

Organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins (dalam Fahmi, 2013:2).

Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat (Nor Ghofur (2014).

Kebijakan publik adalah tentang mengidentifikasi masalah-masalah sosial penting yang mungkin memerlukan tindakan pemerintah untuk ditangani secara efektif, merumuskan solusi untuk masalah-masalah tersebut, dan menilai dampak dari solusi tersebut pada masalah sasaran (Deleon dalam Smith & Chistopher, 2017 : 5).

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program (Cohen dan Uphoff 1977 (dalam Nurbaiti & Bambang, 2017: 226).

Menurut Cohen dan Uphoff 1977 (dalam Rohimat et al., 2017 : 75) membedakan partisipasi menjadi empat jenis:

1. Partisipasi pada pengambilan keputusan.
2. Partisipasi pada pelaksanaan program.
3. Partisipasi pada pengambilan pemanfaatan program.
4. Partisipasi pada evaluasi program.

Pertama, partisipasi pada pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan menentukan alternatif bersama masyarakat yang berkaitan yaitu melalui ide ataupun gagasan yang menyangkut kepentingan umum. Adapun wujud partisipasi ini berkaitan antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan pemikiran, melalui kehadiran saat rapat, memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi pada pelaksanaan yaitu meliputi upaya menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan-kegiatan administratif, koordinasi serta penjabaran program. Ketiga, partisipasi pada pengambilan manfaat. Partisipasi dalam konteks ini tidak lepas dari pelaksanaan yang telah dicapai baik dari sisi kualitas (output kegiatan) maupun kuantitas (dilihat dari presentase keberhasilan program). Keempat, partisipasi dalam hal evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkenaan dengan program yang sudah direncanakan.

Program diartikan sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang berbeda dalam pola terintegrasi dan membentuk rangkaian tujuan yang dinyatakan. Sebuah program dapat mencakup tujuan, prosedur, metode, standar dan anggaran (Terry (dalam Maulana Fariel, 2020 : 32).

Keluarga Berencana menurut (*World Health Organisation*) expert committee pada tahun 1970 yang dimaksud dengan Keluarga Berencana adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu pasangan suami istri untuk: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kelahiran, (4) melakukan pengawasan terhadap proses melahirkan sehingga hubungan yang terjalin pada

pasangan saat melahirkan sangatlah penting yang ini terkait dengan usia yang dimiliki oleh si perempuan, dan (5) adalah bagaimana pasangan secara komitmen dalam menentukan jumlah anak (Kusumawardani & Azizah, 2021 : 13).

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisa deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Pria Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informai yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan gambaran yang sangat jelas dari hasil analisa. Tipe kualitatif digunakan karena dapat menghasilkan data dengan akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara tersusun, fakta dan akurat sehingga mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung dengan menggunakan salah satu metode wawancara sehingga metode ini lebih mempermudah peneliti dalam menghasilkan data dan mudah di pahami oleh masyarakat saat peneliti melakukan pendekatan dalam mendapatkan informasi. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *snowball sampling*. Subjek penelitian adalah sumber atau orang yang memberikan informasi mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan, subjek penelitian merupakan objek yang dituju untuk diteliti oleh penulis.

### **Hasil dan Pembahasan**

Keyinformant dan informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yaitu terdiri dari Bidang Keluarga Berencana (KB), Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Motivator KB pria, dua peserta KB pria, dua pasangan suami istri yang ber-KB, dua pasangan suami istri yang tidak ber-KB.

### **Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Pria Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.**

1. Berdasarkan dari hasil yang peneliti dapatkan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar dan juga pihak PLKB di Kecamatan Tapung Hilir masih kurang dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat perihal KB pria, yang mana lebih memfokuskan penyuluhan KB MKJP untuk wanita paska salin dan juga hanya memberikan informasi dan edukasi perihal KB kepada wanita karena lebih mudah untuk mereka dalam mencari akseptor KB dibandingkan dengan KB pria, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat kurang memperoleh informasi dan edukasi yang menyeluruh mengenai KB pria MOP (vasektomi) baik kegunaannya dan juga manfaat dari KB MOP hal ini berpengaruh kepada pengetahuan masyarakat dan ketertarikan masyarakat yang masih terbilang rendah terhadap penggunaan KB pria, yang mana masyarakat lebih familiar dengan KB kondom.

2. Faktor sosial budaya dimana kurangnya pemahaman laki-laki yang beranggapan bahwa KB adalah urusan perempuan sehingga membentuk pola pikir tidak ingin tau, yang mempengaruhi kurangnya rasa peduli laki-laki terhadap urusan KB dan juga peran laki-laki yang masih kurang sebagai suami dimana perihal KB seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dan juga masyarakat menganggap bahwa KB MOP (vasektomi) sama dengan dikebiri.
3. Kurangnya dukungan keluarga terutama orang terdekat yaitu istri dimana para istri lebih khawatir jika suaminya melakukan KB karena menimbulkan pikiran negative terhadap kondisi fisik pasangannya yang tidak bisa bekerja keras lagi dalam mencari nafkah dan juga khawatir jika mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga suami dan istri serta kekhawatiran jika pasangan mereka bisa melakukan hal perselingkuhan tanpa meninggalkan jejak dengan perempuan lain.

### **1. Pengambilan Keputusan**

Indikator pengambilan keputusan yang dilaksanakan dengan empat sub indikator yaitu Kehadiran Dalam Rapat, Diskusi, Menyumbang Gagasan dan Penolakan Program yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Pria Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam bentuk sosialisasi serta penyuluhan. Dimana pihak dinas DPPKBP3A bahwasannya masih kurang dalam menyampaikan informasi dan edukasi perihal KB pria kepada masyarakat dikarenakan lebih memfokuskan kepada KB MKJP paska salin sebab lebih mudah dalam mencari akseptor KB wanita dibanding akseptor KB pria, dalam kegiatan penyuluhan KB yang terlibat hanya wanita kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pasangannya, dikarenakan sulit mengumpulkan para pria karena sibuk bekerja dan tidak ada ruang komunikasi yang terjalin antara PLKB dengan motivator KB pria.

### **2. Pelaksanaan (Implementasi) Program**

Pada indikator pelaksanaan program pada sub indikator Menggerakkan Sumber Daya Dana, Kegiatan Administrasi dan koordinasi dan Penjabaran Program. KB MOP didanai oleh pemerintah BKKBN yaitu dari *Dana Alokasi Khusus (DAK)* yang masih terbatas anggarannya, meskipun didanai oleh pemerintah petugas KB mengaku masih sulit mendapatkan akseptor KB MOP. Proses administrasi mendaftar sebagai calon akseptor KB MOP yaitu pengisian K4 yaitu keadaan kondisi fisik yang bersangkutan kemudian pengisian infokonsen. Dalam prosesnya masih ditemukan kendala yaitu sulitnya dalam mengumpulkan bapak-bapak atau pria dengan alasan sibuk bekerja dan juga kecemasan pada pria bahwa KB MOP dapat berdampak negatif kepada kesehatan.

### **3. Pemanfaatan Program**

Pada indikator pemanfaatan program pada sub indikator pemanfaatan output atau hasil program dan keberhasilan program. Manfaat dari program KB MOP yakni tidak mengganggu kesehatan pria baik secara fisik kesehatan berkaitan dengan hubungan suami istri kemudian dari manfaat yang dirasakan akseptor KB kondom yakni lebih aman penggunaannya dan juga tidak menimbulkan efek samping serta lebih mudah didapatkan dan juga memberikan dampak positif untuk pasangan mereka dikarenakan sudah tidak lagi berkeluh kesah mengenai efek samping penggunaan dari KB wanita sebelumnya. Keberhasilan program KB pria MOP dan kondom jika dilihat berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dan data pencapaian

pengguna akseptor tahun 2023 masih dikatakan rendah karena tidak mencapai target setiap tahunnya.

#### 4. Evaluasi Program

Pada indikator evaluasi program pada sub indikator monitoring pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi hasil program dan evaluasi terhadap masalah-masalah yang timbul. Untuk proses evaluasi program KB pria di kecamatan Tapung Hilir dilakukan oleh KORLAP (Koordinator Lapangan) yaitu PLKB Kecamatan kemudian proses evaluasi dan monitoring selanjutnya dilakukan oleh pihak DPPKBP3A Kampar melalui SIGA (*Sistem Informasi Gender dan Anak*). Kendala pria untuk mengikuti KB pria yakni minimnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri mengenai kegunaan KB pria, efek samping dan juga manfaatnya, pemahaman yang belum menyeluruh terkait peran sebagai suami yang kurang peduli perihal KB untuk kebaikan pasangannya. Untuk mengevaluasi masalah- masalah yang timbul DPPKBP3A dan PLKB melakukan evaluasi kembali melalui rapat koordinasi desa dan juga rapat koordinasi kecamatan.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat dalam program KB pria di Kecamatan Tapung Hilir belum berpartisipasi dengan baik, dilihat dari tingkat partisipasi akseptor tahun 2023 yang belum mencapai target BKKBN dan juga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai KB pria baik jenisnya dan juga manfaat dari KB pria dikarenakan kurangnya informasi dan edukasi (KIE) tentang KB pria di Kecamatan Tapung Hilir dan juga masih adanya mitos-mitos yang beranggapan KB pria MOP sama dengan Kebiri dan juga dilihat adanya faktot-faktor penghambat dalam program KB pria.

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Membuat terobosan metode sosialisasi penyampaian informasi program kondom dan vasektomi melalui media elektronik maupun cetak seperti pemasangan media promosi KB pria standing banner di puskesmas, balai kampung KB, kantor desa.
2. DPPKBP3A serta PLKB kecamatan perlu mengupayakan menghidupkan peran kelompok KB pria (motivator KB pria) untuk menjadi *agent of change* sehingga dapat membantu petugas KB dalam program peningkatan penyuluhan atau KIE (Komunikasi Informasi Edukasi).
3. Istri berupaya memberikan dukungan terhadap suaminya untuk terus berpartisipasi dalam program KB.

#### Daftar Pustaka Buku

Abd. Rohman, M. A. (2017). *Dasar dasar manajemen*.

Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. In *Gorontalo: Ideas Publishing*.

Book, . (2019). MADURA 2030 Ilmu Sosial Progresif Untuk Madura Iqbal Nurul Azhar Surokimm. In *Researchgate.Net* (Issue January).

<https://www.researchgate.net/publication/330347688>

BKKBN. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cetakan ke-5. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

---

2015.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.

Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Ibrahim, H. H., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, Dan Kebijakan Publik*.

Islamy, M.Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusumawardani, A. P., & Azizah, N. (2021). *Konsep Kependudukan Dan KIE Dalam Pelayanan KB*.

Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. *Pustaka Ilmu*, 1, viii+104 halaman.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Population Bureau. (2015). World Population Data Sheet, with a special focus on women's empowerment. *Population Reference Bureau*, 1–23.

Priyono. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Zifatama*.

Rezeki, Fitri; Yusup, M. H. et all. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. In *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Vol. 1).

Suaib, Hermanto. 2017. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi.

Siagian, P Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Silalahi, Ulberth. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Bar Algensindo

Sinambela, P. D. L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).

Smith, B. K., & Chistopher, L. W. (2017). *The Public Policy Theory Primer* (Vol. 15, Issue 2). Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.

Syaiful Amri, Hafizin, E.; et all. (2022). Pengantar Ilmu Manajemen. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).

Zulkifli, dan Moris. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR.

## Jurnal

Gustin, G. M., Umam, M. F. K., Khatomy, H., Karantina, T., & Syukur, A. (2021). Pengembangan Potensi Wisata Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan di Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 0–5. <https://doi.org/10.29303/jpmmpi.v4i2.720>

Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 612–625. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/jurnalhenryk\(05-30-13-06-30-56\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/jurnalhenryk(05-30-13-06-30-56).pdf)

Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.

Indrawan, I. (2021). Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 46–56.

<https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14>

- Kurnia, R. (2013). Studi Tentang Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser. *EJournal Administrasi Negara*, 1(4), 1673–1684.
- Maulana Fariel, J. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Melan Angriani Asnawi. (2013). *Manajemen Program Keluarga Berencana di Kota Gorontalo*. Mentari
- Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen Organisasi Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1–339.
- Rizal, M. (2016). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir). *Jom Fisip*, 3(2), 1–11.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Public Partisipation On Implementation Of KOTAKU/PNPM Program In Ciawi Bogor Municipality. *Jurnal Governansi*, 3(2), 71.
- Suharjuddin, D. (2020). Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya. In *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.27>
- Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. In *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*(Vol. 12, Issue 03). <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- Zahrah. (2015). Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana ( Kb ) Di Kecamatan Pakal Surabaya. *Kb*, 1, 1–18.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika:*

- 
- Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- 
- PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten

- Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia*

- (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota

- pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-

139.

- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

## Dokumen

- Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Perpres RI. (2014). Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014*, 41. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan (Tahun 2020 s.d Tahun 2025) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria.
- Keputusan Camat Tapung Hilir No. 411.5/SK-KESSOS/2016/11 tentang Penunjukan Motivator KB Pria.